

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu sebagai sumber acuan yang relevan dan bermanfaat. Melalui telaah terhadap hasil penelitian sebelumnya, peneliti berupaya memperoleh wawasan yang dapat membantu dalam menemukan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Sampah oleh Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Kajian terhadap penelitian terdahulu tersebut berfungsi sebagai pembandingan, tolak ukur, serta pedoman konseptual yang dapat memperkuat arah dan tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dan referensi utama untuk memfasilitasi analisis penulis terhadap Studi Studi terdahulu. Adapun uraian penelitian terdahulu adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh An'im Kafabih dan Mohamad Egi Destiartono (2024) dengan judul "Edukasi dan Pelatihan Program Pengelolaan Sampah (PPS) dan Kontribusinya dalam Capaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*".

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pengelolaan sampah di masyarakat desa yang belum dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola

sampah serta pengolahan sampah yang masih dilakukan secara tradisional sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan studi literatur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pengolahan sampah di masyarakat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengolahan sampah di Desa Banglarangan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang Jaya belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang belum menerapkan pengolahan sampah secara berkelanjutan serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan beberapa program pengolahan sampah seperti pembuatan *eco-enzyme* untuk pengolahan sampah organik, pembuatan *paving block* dari sampah plastik, serta pengelolaan bank sampah untuk sampah anorganik yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan.

Persamaan antara penelitian An'im Kafabih dan Mohamad Egi Destiartono dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada topik yang dikaji, yaitu kedua penelitian membahas upaya pengolahan sampah di masyarakat melalui kegiatan edukasi maupun pelatihan. Kedua penelitian tersebut juga memiliki tujuan yang sejalan, yakni untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan masyarakat dalam

mengelola sampah agar lebih efektif dan berkelanjutan. Perbedaan antara penelitian An'im Kafabih dan Mohamad Egi Destiariono dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian dan subjek yang diteliti. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pelaksanaan program pengolahan sampah secara umum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis lebih difokuskan pada pelatihan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh kelompok PKK dengan sasaran ibu rumah tangga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, dimana penelitian terdahulu dilakukan di Desa Banglarangan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi.

2. Fikri Ahmad Mulyadi (2022) dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran".

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu. pengolahan sampah yang dilakukan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya dukungan pemerintah dalam pemberian bantuan modal, rendahnya pendampingan dan pengawasan, serta belum optimalnya pengembangan kemitraan usaha dalam pengolahan sampah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian berjumlah 6 orang yang terdiri dari 3 pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

Pangandaran dan 3 anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Purbahayu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Desa Purbahayu belum berjalan secara optimal. Dari lima dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan), terdapat dua dimensi yang belum optimal yaitu penyokongan dan pemeliharaan. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya kepercayaan diri masyarakat, anggapan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan modal besar, rendahnya kualitas produk hasil pengolahan sampah, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta kurangnya kerja sama dengan pihak lain.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah keduanya membahas pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran kegiatan. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan sampah di tingkat masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Fikri Ahmad Mulyadi. berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat 5P dari Suharto. Sedangkan penelitian saya berfokus pada pelaksanaan pelatihan pengolahan sampah di Desa Pasirhuni Kecamatan

Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan teori pelatihan yang meliputi peserta, pelatih, materi, metode, tujuan, serta evaluasi pelatihan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Zakaria dkk. (2022) dengan judul “Analisis Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung” bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mekarsari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rancang bangun observasional deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *survei* lapangan, *focus group discussion (FGD)*, wawancara terbuka, dan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan sampah di Desa Mekarsari masih belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya lahan untuk tempat penampungan sementara (TPS), keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik, sehingga sebagian masyarakat masih melakukan pembuangan sembarangan dan pembakaran sampah.

Persamaan antara penelitian Mochamad Zakaria dkk. dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai pengolahan sampah di tingkat masyarakat. Kedua penelitian tersebut sama-sama menyoroti kondisi dan permasalahan yang terjadi dalam praktik pengolahan sampah di lingkungan masyarakat. Perbedaan antara penelitian Mochamad Zakaria dkk. dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian penelitian. Penelitian Zakaria

dkk. lebih menitikberatkan pada analisis sistem pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Sementara itu, penelitian penulis lebih mengarah pada kegiatan pelatihan pengolahan sampah yang dilakukan oleh kelompok PKK sebagai upaya pemberdayaan ibu rumah tangga. Perbedaan lainnya juga terdapat pada konteks dan lokasi penelitian yang digunakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, diketahui bahwa sebagian besar penelitian lebih berfokus pada pengolahan sampah secara umum, penyuluhan pengolahan sampah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Sementara itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji pelaksanaan pelatihan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh Kelompok PKK bagi ibu rumah tangga di Desa Pasirhuni Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan indikator pelatihan menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara. Penelitian ini memberikan fokus kajian yang lebih spesifik pada proses pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Pelatihan

Menurut Notoatmodjo (2009:16), pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia.

Menurut Hasibuan (2017), pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan

keterampilan di luar sistem pendidikan formal dalam waktu relatif singkat, dengan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori.

Rivai (2020:285) menambahkan bahwa pelatihan merupakan kegiatan penting dalam proses pendidikan yang di dalamnya ada proses pembelajaran jangka pendek, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Menurut Simamora (dalam Sinarbela, 2017:169), “pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seseorang.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (5) menyebutkan bahwa kursus atau pelatihan adalah satuan Pendidikan non formal yang berfungsi menyelenggarakan kursus atau pelatihan bagi masyarakat yang memerlukan bekal hidup, sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Menurut Amirullah dan Budiyo (2014), “Skill atau keterampilan adalah suatu kemampuan untuk menterjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.”.

Menurut Brewer dan Burgess (2005, dalam Eldyani & Wardoyo, 2018:143), instruktur sebagai ujung tombak dalam penyampaian materi dan pelatihan secara langsung kepada peserta pelatihan mempunyai tanggung jawab besar dalam memotivasi peserta pelatihan untuk menghadiri kelas

Menurut Kamil (2012:159), materi pelatihan yang diberikan kepada peserta perlu disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan sasaran pelatihan. Materi tersebut harus memperhatikan kebutuhan belajar, minat, harapan, dan karakteristik peserta sehingga materi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan. Menurut Sarwono & Meinarno (2009), sikap (*attitude*) merupakan kecenderungan perasaan seseorang terhadap suatu objek, baik berupa rasa senang, tidak senang, maupun netral

Menurut Kamil (2012:157–161), dalam pelatihan digunakan berbagai pendekatan dan metode, yaitu pendekatan massal, kelompok, dan individual. Pemilihan metode tersebut disesuaikan dengan tujuan pelatihan dan karakteristik peserta agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.

Menurut Kamil (2012:11–12), dalam pelatihan terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain prinsip perbedaan individu, prinsip motivasi, dan prinsip partisipasi aktif. Prinsip perbedaan individu menunjukkan bahwa setiap peserta memiliki latar belakang, pendidikan, pengalaman, minat, bakat, dan kemampuan yang berbeda sehingga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelatihan. Prinsip motivasi menekankan bahwa peserta perlu memiliki dorongan untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar tujuan pelatihan dapat tercapai. Selain itu, prinsip partisipasi aktif menjelaskan bahwa keterlibatan peserta secara aktif dalam proses pelatihan dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta.

Adapun Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara (2020:44) menyatakan bahwa pelatihan (*training*) adalah proses pendidikan jangka pendek yang

menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk mencapai tujuan terbatas.

Istilah pelatihan yang dilaksanakan tepat sasaran dan berdaya guna, maka diperhatikan komponen-komponen pelatihan yang di jelaskan oleh Mangkunegara (2020:44).

1. Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur, oleh karena itu pelatihan yang di selenggarakan bertujuan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan keterampilan peserta dalam pelaksanaan pelatihan
 - b. Meningkatkan pemahaman peserta tentang etika dan tanggung jawab sebagai peserta pelatihan
2. Para pelatih (*trainers*) harus memiliki kualifikasi yang memadai dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai keahlian yang berhubungan dengan materi pelatihan..
 - b. Pelatih/instruktur yang mampu membangkitkan motivasi.
3. Materi Latihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak di capai:
 - a. Kesesuaian materi dengan kebutuhan pembelajaran peserta.
 - b. Materi pelatihan dapat membentuk sikap peserta.
4. Metode pelatihan dan pengembangan harus sesuai dengan Tingkat kemampuan pegawai yang menjadi peserta:
 - a. Kesesuaian metode pelatihan yang di berikan dengan kemampuan peserta.

- b. Kemudahan peserta dalam memahami materi yang di berikan melalui metode pelatihan.
5. Peserta pelatihan dan pengembangan (*trainee*) harus memenuhi persyaratan yang di tentukan, oleh karena itu perlu dilakukan seleksi untuk menentukan peserta agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti :
- a. Peserta pelatihan memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang sesuai.
 - b. Peserta pelatihan memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan.

Secara keseluruhan, pelatihan dapat dipahami sebagai proses pembelajaran yang disusun secara sistematis dan terencana untuk membantu peserta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam waktu yang relatif singkat. Pelatihan lebih menekankan pada praktik langsung agar peserta mampu menerapkan kemampuan yang diperoleh dalam kegiatan nyata, baik di lingkungan masyarakat maupun kehidupan sehari-hari. Selain itu, pelatihan bertujuan membentuk perilaku dan kemampuan peserta agar lebih terampil, percaya diri, dan siap menjalankan tugas atau aktivitas yang diharapkan setelah pelatihan berlangsung. Pelatihan bukan hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mengembangkan kemampuan individu sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih optimal dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun lingkungannya.

2.2.2 Tujuan Pelatihan

Menurut Sudjana (2007:118) mengatakan bahwa “tujuan pelatihan adalah deskripsi tentang perilaku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta

pelatihan setelah mengikuti pelatihan”. Dilihat dari pengembangan sumberdaya manusia,

Menurut Oemar Hamalik (2007:14) menyatakan bahwa pelatihan bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam sembilan aspek, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kerja;
2. Pembinaan budi pekerti;
3. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan;
4. Meningkatkan taraf hidup;
5. Meningkatkan kecerdasan;
6. Meningkatkan keterampilan;
7. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan;
8. Menciptakan lapangan kerja;
9. Meratakan pembangunan dan pendapatan.

Sedangkan Tujuan pelatihan menurut Menurut Dale S. Beach (1975, dalam Kamil, 2012) mengemukakan, *“The objective of training is to achieve a change in the behavior of those trained”* (tujuan pelatihan adalah untuk memperoleh perubahan dalam tingkah laku mereka yang dilatih).

2.2.3 Manfaat Pelatihan

Menurut Simamora (2006:278), manfaat pelatihan adalah: Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas.

1. Mengurangi waktu belajar untuk mencapai standar kerja.
2. Menciptakan sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih baik.
3. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia.

4. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja.
5. Membantu pengembangan pribadi peserta.

Sebagaimana dikemukakan oleh Oemar Hamalik (2007) pelatihan mempunyai fungsi edukatif, administratif, dan personal. Fungsi *educatif* berkaitan dengan pendidikan pada umumnya, yaitu melaksanakan tugas pendidikan terutama program Pendidikan sepanjang hayat. Fungsi administratif adalah melaksanakan upaya pemenuhan syarat administratif yang dibutuhkan setiap orang untuk memasuki lapangan kerja. Fungsi personal adalah melaksanakan pembinaan pribadi terutama dalam mengatasi masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh peserta pelatihan.

Menurut Siagian (2008) paling tidak ada tujuh manfaat bagi organisasi. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan, antara lain karena tidak adanya pemborosan, karena kecermatan melaksanakan tugas, tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai satuan kerja, lancarnya koordinasi sehingga organisasi dapat bergerak sebagai kesatuan yang bulat dan utuh.
- b. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, antara lain karena adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa
- c. baik teknikal maupun intelektual, saling menghargai dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berfikir dan bertindak secara inovatif.
- d. Terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan oleh para manajer.

- e. Meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitem organisasional yang lebih tinggi.
- f. Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif.
- g. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang ada pada gilirannya memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalisasinya.
- h. Penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya adalah tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan para anggota organisasi Secara khusus karyawan/ pegawai sebuah instansi/ perusahaan yang mengikuti pelatihan akan memperoleh manfaat pribadi sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan pengetahuan dan atau keterampilan baru guna meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas kerja
 - b. Mendapatkan dorongan eksternal guna meningkatkan keberanian menghadapi perubahan dan atau situasi baru
 - c. Memperoleh kesempatan mengembangkan jangkauan komunikasi guna memperluas akses pergaulan
 - d. Memperoleh dorongan eksternal untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan diri atas kemampuan diri sendiri.

2.2.4 Definisi sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian, termasuk barang rusak atau cacat selama manufaktur maupun materi berlebihan atau buangan (Basriyanta, 2007:17).

Menurut Hadiwiyoto (1983, dalam Batubara dkk., 2020), sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami suatu perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, hasil pengolahan, maupun karena sudah tidak memiliki manfaat sehingga secara sosial dan ekonomis tidak lagi bernilai serta berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun, sampah masih dapat memberikan nilai ekonomis apabila dikelola dan didaur ulang menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Tim Penulis Penebar Swadaya (2008:6) dalam Jurnal Tekno Global oleh L. R. Lubis dan D. Yulianti (2020), sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Sedangkan berdasarkan SNI 19-3983-1995, sumber sampah berasal dari:

- a. Perumahan; rumah permanen, rumah semi permanen, rumah non permanen.
- b. Non perumahan; kantor, toko atau ruko, pasar, sekolah, tempat ibadah, jalan, hotel, restoran, industri, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.

Menurut Prihandarini (2004:11), berdasarkan sumbernya sampah digolongkan kepada dua kelompok besar yaitu:

1. Sampah domestik, yaitu sampah yang sehari-harinya dihasilkan akibat kegiatan manusia secara langsung, misalnya; dari rumah tangga, pasar, sekolah, pusat keramaian, permukiman, dan rumah sakit.
2. Sampah non domestik, yaitu sampah yang sehari-hari dihasilkan oleh kegiatan manusia secara tidak langsung, seperti dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, transportasi, dan sebagainya.

2.2.5 Pengolahan sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengertian pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan tersebut. Setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum yang menghasilkan timbulan sampah. Sampah yang diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2008 yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik.

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu :

1. Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah (R1), guna-ulang (R2) dan daur-ulang (R3).

2. Penanganan sampah (*waste handling*), yang terdiri dari:
- a. Pemilahan: dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
 - b. Pengumpulan: dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 - c. Pengangkutan: dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir.
 - d. Pengolahan: dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
 - e. Pemrosesan akhir sampah: dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah di sebagian besar kota masih menimbulkan permasalahan, terutama karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan menggunakan praktik *reduce, reuse, recycle* (Dewi *et al.*, 2021).

Definisi Bank Sampah menurut Yayasan Unilever Indonesia (2013), adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, pelaksanaan bank sampah juga memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang cukup besar. Pelaksanaan bank sampah dapat memberikan output nyata bagi masyarakat berupa kesempatan kerja dalam melaksanakan manajemen operasi bank sampah dan investasi dalam bentuk tabungan. Munculnya bank sampah dapat menjadi momentum awal dalam membina kesadaran masyarakat. Pembangunan bank sampah sebenarnya tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus disertai integrasi dengan gerakan 3R secara menyeluruh di kalangan masyarakat.

2.2.6 Pemberdayaan kesejahteraan keluarga(PKK)

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki kedudukan strategis sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang menegaskan bahwa PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa PKK tidak hanya berperan sebagai organisasi pendukung, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kapasitas keluarga dan masyarakat melalui berbagai bentuk pembinaan.

Lebih lanjut, pelaksanaan Gerakan PKK diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017. Dalam Pasal 28 Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 ditegaskan bahwa Tim Penggerak PKK memiliki fungsi dan tugas dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, serta penggerakan program PKK. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan program pokok PKK.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, Tim Penggerak PKK mempunyai tugas:

1. Melakukan pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
2. Menggerakkan peran serta masyarakat; dan
3. Melakukan pengendalian terhadap 10 Program Pokok PKK.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2020, Tim Penggerak PKK memiliki fungsi:

1. Menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 Program Pokok PKK;
2. Merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai kebutuhan masyarakat;
3. Memberikan pembinaan melalui penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;

4. Melakukan supervisi, advokasi, dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
5. Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

PKK berperan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang mendorong partisipasi keluarga, khususnya perempuan dan ibu rumah tangga, dalam meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, kesehatan, ekonomi keluarga, serta pelestarian lingkungan melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

10 Program Pokok PKK

Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020, 10 Program Pokok PKK meliputi:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
2. Gotong Royong;
3. Pangan;
4. Sandang;
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
6. Pendidikan dan Keterampilan;
7. Kesehatan;
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
9. Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
10. Perencanaan Sehat.

Menurut Sutedjo (2006:3), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan wadah membina keluarga bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi untuk keluarga

sejahtera yang mandiri dengan meningkatkan mental spiritual perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan desa yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa. PKK sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah dan kaum perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. PKK ini lebih diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui program-program yang dijalankan (Putri & Jatiningsih, 2020).

Kader PKK menjadi ujung tombak perubahan dalam struktur masyarakat dan sering kali diberdayakan untuk mengatasi beragam masalah, termasuk isu-isu kesehatan. Sebagai contoh, mereka diberdayakan untuk menyebarkan informasi kesehatan. Dampak dari kegiatan tersebut adalah terbentuknya kesamaan persepsi di antara para kader PKK mengenai langkah-langkah meningkatkan derajat kesehatan melalui penyebaran informasi kesehatan dan penguatan partisipasi mereka (Kesumasari *et al.*, 2020).

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh PKK merupakan bentuk implementasi langsung dari tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. PKK berperan sebagai *leading sector* karena memiliki struktur organisasi yang berjenjang, jangkauan hingga tingkat keluarga, serta mandat regulatif untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Keberadaan PKK

sebagai pelaksana pelatihan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan sosial.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari masyarakat dan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat itu sendiri. PKK berfokus pada pembentukan keluarga yang religius, sehat, mandiri, dan sejahtera. Melalui berbagai programnya, PKK berperan sebagai wadah yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat, khususnya perempuan, dalam pembangunan di tingkat desa.

Dalam pelaksanaannya, kader PKK menjadi ujung tombak karena berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan edukasi, peningkatan kesadaran, serta dukungan terhadap program sosial, termasuk di bidang kesehatan. Secara keseluruhan, PKK berkomitmen untuk membentuk keluarga yang berdaya dan berkualitas melalui penerapan nilai-nilai Pancasila serta penguatan aspek mental, spiritual, dan pola hidup positif dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.7 Ibu Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ibu rumah tangga dapat diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga tidak bekerja di kantor

Ibu rumah tangga adalah wanita yang banyak menghabiskan waktunya dirumah dan mempersembahkan waktunya tersebut untuk mengasuh dan

mengurus anak anaknya menurut pola yang diberikan masyarakat umum (Dwijayannti., 1999:32).

Ibu rumah tangga adalah wanita yang mayoritas waktunya dipergunakan untuk mengajarkan dan memelihara anak anaknya dengan pola asuh yang baik dan benar (Kartono., 2011:18).

Disamping itu, Menurut Effendy (2022 : 32), ibu rumah tangga juga dapat dikatakan sebagai sosok ibu yang berperan dalam :

1. Mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu domestik lainnya;
2. Mengasuh dan mendidik anak anaknya sebagai satu kelompok dan peranan sosial;
3. Memenuhi kebutuhan efektif dan sosial anak-anaknya;
4. Menjadi anggota masyarakat yang aktif dan harmonis dilingkungannya yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti PKK, Arisan, Majelis Taklim

Ibu rumah tangga mempunyai peran strategis dalam menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah rumah tangga. Pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu rumah tangga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan sampah, karena aktivitas rumah tangga merupakan salah satu penyumbang utama timbulan sampah sehari-hari. Oleh karena itu, keterlibatan ibu rumah tangga dalam pemilahan, pengurangan, dan pengolahan sampah menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. (Sitohang & Saragi, 2022).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2017:65). Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pelatihan pengolahan sampah dalam meningkatkan kemampuan ibu rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan teori pelatihan yang dikemukakan oleh Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara (2020:44), yang menyatakan bahwa pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek yang dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta.

Menurut Mangkunegara (2020), keberhasilan pelatihan dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu tujuan pelatihan, pelatih, materi, metode, dan peserta pelatihan. Komponen-komponen tersebut menjadi indikator dalam menilai efektivitas pelatihan yang dilaksanakan.

Selain itu, keterampilan merupakan hasil penting dari pelatihan, karena pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kemampuan peserta dalam mengaplikasikan materi yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks penelitian ini, pelatihan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh kelompok PKK bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ibu rumah tangga dalam mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Penelitian ini akan melihat bagaimana pelatihan tersebut

berdampak pada kemampuan ibu rumah tangga dan program pemberdayaan di Desa Pasirhuni

Istilah pelatihan yang dilaksanakan tepat sasaran dan berdaya guna, maka diperhatikan komponen-komponen pelatihan yang di jelaskan oleh Mangkunegara (2020:44).

1. Tujuan dan sasaran

- a. Meningkatkan keterampilan peserta dalam pelaksanaan pelatihan
- b. Meningkatkan pemahaman peserta tentang etika dan tanggung jawab sebagai peserta pelatihan

2. Pelatih

- a. Mempunyai keahlian yang berhubungan dengan materi pelatihan.
- b. pelatih/instruktur yang mampu membangkitkan motivasi

3. Materi

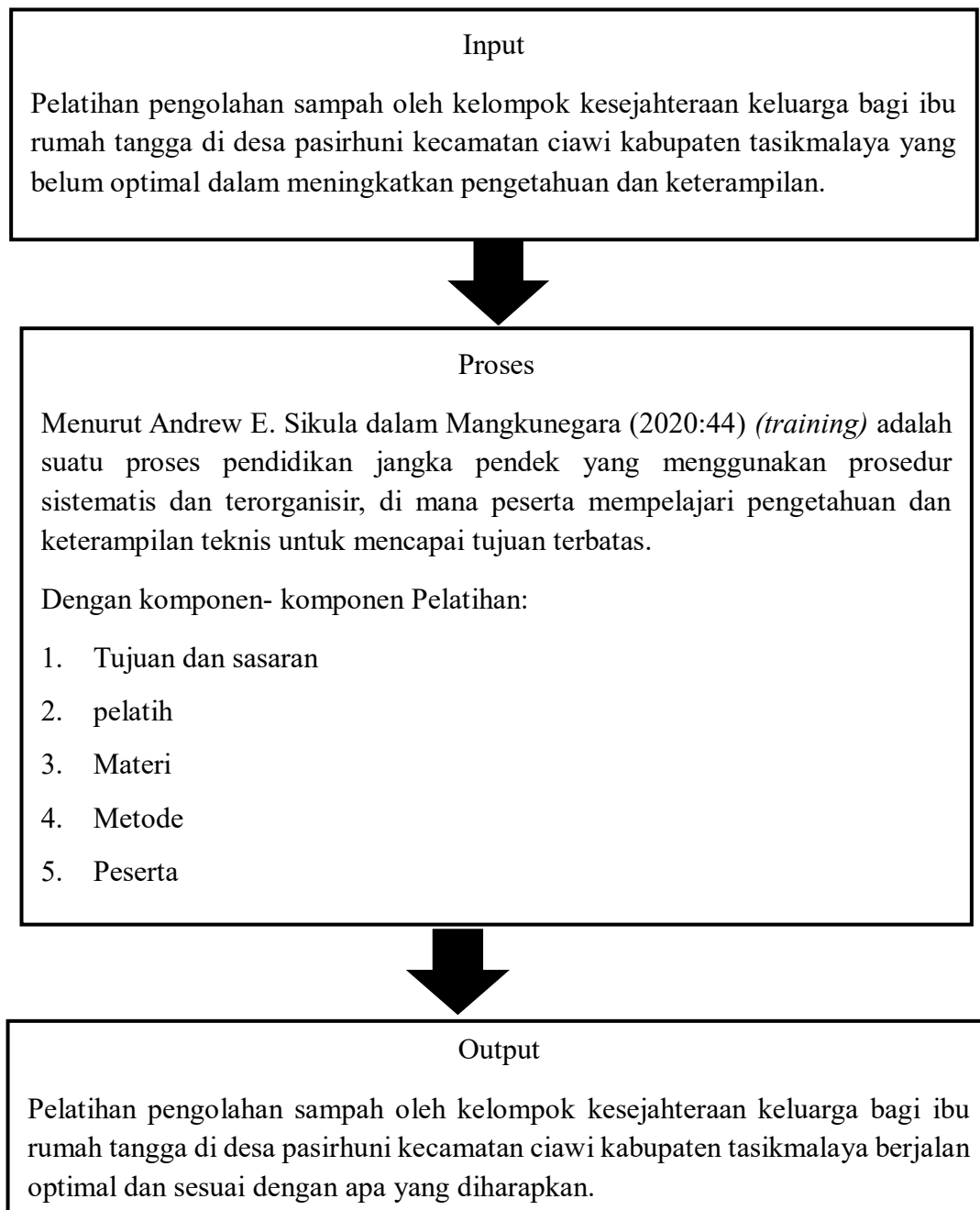
- a. Kesesuaian materi dengan kebutuhan pembelajaran peserta
- b. Materi pelatihan dapat membentuk sikap peserta

4. Metode

- a. Kesesuaian metode pelatihan yang di berikan dengan kemampuan peserta
- b. Kemudahan peserta dalam memahami materi yang di berikan melalui metode pelatihan

5. Peserta

- a. Peserta pelatihan memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang sesuai.
- b. Peserta pelatihan memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan.



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Proposisi

Penelitian mengenai pelatihan pengolahan sampah oleh Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bagi ibu rumah tangga di Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan sebelumnya belum optimal dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta.

Menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara (2020:44), pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek yang dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis peserta dalam mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan perlu mengacu pada komponen pelatihan yang tepat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Pelaksanaan pelatihan pengolahan sampah yang mengacu pada komponen pelatihan yang tepat (tujuan, pelatih, materi, metode, dan peserta) akan berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu rumah tangga.